

**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA - OPD)**

TAHUN ANGGARAN 2024



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 telah tersusun.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi dengan tetap memperhatikan isu-isu Ketahanan Pangan yang berkembang melalui Musyawarah Forum OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat dijadikan acuan/pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah ikut berperan aktif sehingga rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dapat tersusun dengan baik.

Mamuju, 28 Juli 2023

KEPALA DINAS,


Ir. H. ABD. WARIS BESTARI, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19651201 199703 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	9
2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.....	14
3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	15
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	17
3.3. Program dan Kegiatan.....	18
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan PD.....	19
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.....	19
Bab V Penutup.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada tahun 2024 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

Sulawesi Barat yakni sebagai salah satu upaya dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.

Untuk dapat mewujudkan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun Kedua dari RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51).
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 – 2034
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46.A Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan

Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Bagian Kedelapan Upt Dinas Ketahanan Pangan Paragraf 1 Uptd Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan)

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja SKPD disusun dengan maksud dan tujuan adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

A. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan sampai level Sub Kegiatan. Secara terinci hasil-hasil yang dicapai sampai dengan bulan Juli 2023 dapat dilihat melalui tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5,443,571,150		3,046,099,656		55.96%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	0	265,518,620	-	101,707,815	0.00%	38.31%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	110,643,200	-	64,202,400	0.00%	58.03%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	34,550,000	-	9,364,000	0.00%	27.10%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	5,000,000	-	-	0.00%	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	21,800,000	-	8,148,000	0.00%	37.38%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	5,000,000	-	213,424	0.00%	4.27%

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	88,525,420	-	19,779,991	0.00%	22.34%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,378,308,671		2,634,671,474		60.18%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	45	4,370,308,671	22	2,634,671,474	48.33%	60.29%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	8,000,000	-	-	0.00%	0.00%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3,610,000		-		0.00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	3,610,000	-	-	0.00%	0.00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			49,993,600		38,250,000		76.51%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	45	42,800,000	-	35,750,000	0.00%	83.53%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	804,000	-	-	0.00%	0.00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3	6,389,600	1	2,500,000	33.33%	39.13%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			316,189,209		176,621,790		55.86%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	68,020,600	3	29,885,175	37.50%	43.94%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	16,999,700	-	12,500,000	0.00%	73.53%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5	30,171,129	2	13,680,650	40.00%	45.34%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	135,096,420	7	89,305,965	58.33%	66.11%

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	65,901,360	-	31,250,000	0.00%	47.42%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			78,228,100		15,380,000		19.66%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	19,700,000	-	15,380,000	0.00%	78.07%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	58,528,100	-	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85,367,350		17,420,500		20.41%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	66,717,400	-	17,020,500	0.00%	25.51%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	18,649,950	-	400	0.00%	0.00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			266,355,600		62,048,077		23.30%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	131,997,200	-	29,935,276	0.00%	22.68%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	125,358,400	3	32,112,801	25.00%	25.62%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	9,000,000	-	-	0.00%	0.00%
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			1,488,059,980		747,178,172		50.21%
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			586,819,220		493,190,300		84.04%

	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan)	2	80,830,560	-	44,791,400	0.00%	55.41%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	1	49,230,000	-	18,374,500	0.00%	37.32%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Dokumen)	1	27,993,100	1	25,755,000	100.00%	92.00%
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			428,765,560		404,269,400		94.29%
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			528,348,910		16,461,450		3.12%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	1	528,348,910	-	16,461,450	0.00%	3.12%
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi			372,891,850		237,526,422		63.70%
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	1	25,699,650	-	5,930,000	0.00%	23.07%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	2	300,043,950	-	192,593,772	0.00%	64.19%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah laporan survey Analisis Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan (Laporan)	1	47,148,250	-	39,002,650	0.00%	82.72%
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			145,451,020		74,117,350		50.96%
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi			45,859,000		7,581,750		16.53%

	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	7	45,859,000	-	7,581,750	0.00%	16.53%
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			99,592,020		66,535,600		66.81%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (Dokumen)	1	59,404,520	-	56,818,500	0.00%	95.65%
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	40,187,500	-	9,717,100	0.00%	24.18%
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			145,561,815		72,060,220		49.50%
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			145,561,815		72,060,220		49.50%
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina (Dokumen)	1	12,251,000	1	11,251,000	100.00%	91.84%
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Sertifikat)	4	119,394,815	4	50,163,420	100.00%	42.01%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Dokumen)	1	13,916,000	-	10,645,800	0.00%	76.50%
	JUMLAH			7,222,643,965		3,939,455,398		54.54%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

capaian kinerja Dinas ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 berdasarkan target indikator kinerja yang sudah ditentukan di gambarkan pada table 2.2

Tabel 2.2

Indikator Kinerja / Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022	Capaian 2022	Kendala/Permasalahan
Persentase Terjaminnya Kemandirian Pangan Daerah	90%		
Koefisien Harga Komoditas Pertanian Strategis			
Beras Premium	< 5 %	1%	Mengalami penurunan capaian karena adanya curah hujan tinggi sehingga menyebabkan gagal panen dan kualitas beras menurun
Beras Medium	< 6 %	1%	
Kedelai Biji Kering	< 9 %	6%	
Daging sapi Murni	< 10 %	2%	Karena kurangnya pasokan Daging sapi dari RPH
Telur Ayam Ras	< 8 %	13%	Adanya Kenaikan harga di tingkat Produsen dan kenaikan harga terjadi karena kenaikan Inflasi
Daging Ayam Ras	< 10%	5%	
Cabai Rawit Merah	< 5 %	34,9%	Adanya Kenaikan harga di tingkat Produsen dan kenaikan harga terjadi karena kenaikan Inflasi
Cabai Rawit Keriting	< 7 %	20%	Adanya Kenaikan harga di tingkat Produsen dan kenaikan harga terjadi karena kenaikan Inflasi
Bawang Merah	< 9 %	17,19%	Adanya Kenaikan harga di tingkat Produsen dan kenaikan harga terjadi karena kenaikan Inflasi
Bawang Putih	< 5 %	3,09%	
Gula Pasir Lokal	< 6 %	4,19%	
Minyak Goreng dan terigu	< 3 %	15,15% dan 4,72%	Adanya Kenaikan harga di tingkat Produsen dan kenaikan harga terjadi karena kenaikan Inflasi
Data/Informasi cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa	80,000	126,847	
Persentase Ketersediaan Data Harga Pangan Lokal	10	100	Permasalahan adanya beberapa daerah yang tidak ada jaringan, sehingga data terkadang terlambat diupload
Skor Pola Pangan Harapan / PPH	78,7	76	untuk Capain Skor PPH tahun 2022, dengan mengacu pada AKE 2100

Tingkat Konsumsi Energi terhadap Standar Konsumsi Energi	98,5	104,1	Konsumsi energi terhadap AKE 2000kkl/kap/hr sudah melampaui target sampai tahun 2022. pada tahun 2022 mengalami peningkatan disebabkan oleh Konsumsi masyarakat yang sudah mulai stabil
Persentase Berkurangnya Daerah rawan Pangan	5	11,59%	*Trend perkembangan daerah rawan pangan dari thn ke thn dipengaruhi oleh indikator ketahanan & kerentanan pangan (3 aspek , 9 indikator)/multi efek. Berkurangnya daerah rawan pangan sangat ditentukan oleh penanganan lintas sektor (multi sektor) *Penanganan dari segi Pangan untuk tahun 2022, sebanyak 14 Daerah. Dari 18 daerah rawan pangan tahun 2021, sebanyak 8 daerah yang berkurang atau menurun klasifikasi. Daerah Rawan Pangan, tahun 2022 selain berkurang ada juga penambahan daerah rawan pangan yang baru. sehinggadaerah rawan pangan dari tahun 2021 dari jumlah 18 daerah menjadi 32 daerah.
Jumlah Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Membahayakan Manusia	5	0	Pengujian Keamanan Pangan PSAT untuk tahun 2022 tidak di temukan kasus yang membahayakan manusia

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi, baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel berikut :

Tabel 2.2

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kurangnya Akses Pangan	Pangan Belum terdistribusikan	Belum ada data distribusi pangan yang menyeluruh

	Masyarakat	dengan baik	Belum ada regulasi distribusi pangan
			belumada/optimalnya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
2	Belum optimalnya konsumsi energi dan protein masyarakat secara seimbang	Terbatasnya penganekaragaman atau diversifikasi pangan	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
			Rendahnya pendapatan masyarakat
			Masih sedikit pangan olahan lokal yang berkualitas dan berdaya saing
	Masih terdapatnya Daerah Rawan Pangan		Belum Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan.
			Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor yang terkait.
			Kurangnya pemahaman dan partisipasi Pemerintah Daerah, Stakeholder dan masyarakat mengenai pentingnya Penyediaan Cadangan Pangan pemerintah Daerah
	Belum Optimalnya Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		Kurangnya Kesadaran pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk melakukan sertifikasi dan registrasi PSAT
	Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Keamanan Pangan		Belum tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Keamanan Pangan (Laboratorium)
Belum Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Bermutu		Kurangnya petugas pengawas keamanan pangan yang bersertifikat	

Permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Provinsi Sulawesi Barat adalah belum optimalnya kualitas konsumsi pangan masyarakat yang terlihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum mencapai angka 100. Skor PPH belum tentu menunjukkan kurangnya konsumsi energi dan protein masyarakat, namun menggambarkan pola konsumsi yang tidak seimbang atau masih terdapat kelompok pangan yang belum memenuhi standar gizi yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa permasalahan pokok Dinas Ketahanan Pangan disebabkan oleh :

1. Pangan Belum terdistribusikan dengan baik, akar dari permasalahan ini dikarenakan belum ada data distribusi pangan secara menyeluruh, belum ada regulasi distribusi pangan, dan belum ada/ optimalnya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.
2. Terbatasnya penganekaragaman atau diversifikasi pangan, akar dari permasalahan ini Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), Rendahnya pendapatan masyarakat dan Masih sedikit pangan olahan lokal yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Masih terdapatnya Daerah Rawan Pangan, sesuai dengan hasil pemetaan dari Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan. Dan akar dari permasalahan tersebut dikarenakan belum Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan, kurang optimalnya koordinasi lintas sektor yang terkait.
4. Belum Optimalnya Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, akar dari permasalahan ini adalah Kurangnya pemahaman dan partisipasi Pemerintah Daerah, Stakeholder dan masyarakat mengenai pentingnya Penyediaan Cadangan Pangan pemerintah Daerah.
5. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Keamanan Pangan, sesuai dengan data dari Unit Pelaksana Teknis Dnas Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) Kurangnya Kesadaran pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk melakukan sertifikasi dan registrasi PSAT.
6. Belum Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Bermutu, sehingga masih sulitnya Seksi Keamanan Pangan dan UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (UPTD BSP-PSAT) untuk melakukan pengawasan dengan maksimal. Akar masalah dari permasalahan ini, Belum tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Keamanan Pangan (Laboratorium) dan Kurangnya petugas pengawas keamanan pangan yang bersertifikat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 merupakan tahap ke-lima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu *tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Sulawesi Barat*. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Sulawesi Barat.

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat yaitu peningkatan ekonomi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Maka dengan dibuatnya renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, dapat mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah periode tahun 2023 – 2026.

Yang menjadi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, yaitu :

Tabel 1

Tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026

No	Tujuan RPD Sulawesi Barat Tahun 2023- 2026	Sasaran RPD Sulawesi Barat Tahun 2023-2026	Strategi RPD Sulawesi Barat Tahun 2023- 2026	Arah Kebijakan RPD Sulawesi Barat Tahun 2023- 2026	Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah	Faktor	
						Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam mendukung Perekonomian Daerah	Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan	Peningkatan Hilirisasi Pengelolaan Komoditas berbasis Sumber Daya Alam (Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan) melalui dukungan Sarana Prasarana pada Proses Produksi dan	Belum optimalnya konsumsi energi dan protein masyarakat secara seimbang.	Kurangnya Sarana dan Prasarana	infrastruktur yang dapat memudahkan pelayanan
						Kurangnya inovasi masyarakat terhadap pangan lokal	Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pangan lokal yang berkualitas.

				Pengolahan serta Pengembangan Digitalisasi UMKM			
2	Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berbudaya	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Menurunkan Tingkat Morbiditas dan Mortalitas serta percepatan Penurunan Stunting	Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat		Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan konsumsi gizi yang seimbang	Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat menjadi salah satu ujung tombak penyampaian pelayanan kepada masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan

Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.

b. Sasaran

Pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat mikro/rumah tangga dan individu serta ditingkat makro/daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indicator kinerjanya disajikan dalam table sebagai manaberikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-			
				(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)				
	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Indikator : Skor PPH 1 Kinerja : Meningkatnya Skor PPH	82.4	86.3	90.2	94.1
			1 Indikator : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kinerja :Meningkatnyaskor PPH Konsumsi	82.4	86.3	90.2	94.1
			2 Indikator : Skor PPH ketersediaan Kinerja : Terpenuhiyaskor PPH Ketersedian	75	80	85	90

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, dalam mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi misi kementerian pertanian. Maka, beberapa program pendukung yang termuat dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 , yaitu :

Program Utama

1. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
3. Program penanganan kerawanan pangan;
4. Program pengawasan keamanan pangan.

Program Pendukung

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9,421,121,323.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			9,421,121,323.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5,768,786,029.00
	<i>Nilai SAKIP Lingkup OPD (poin)</i>	66.50	
	<i>Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD (Persentase)</i>	85	
	<i>Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD (poin)</i>	75	
	<i>Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persentase)</i>	85	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			232.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			101.800.000,00
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	1	
	<i>Melaksanakan Rapat Kordinasi Teknis Perencanaan (Kegiatan)</i>	1	60.000.000,00
	<i>Menyusun Program dan Kegiatan (Kegiatan)</i>	1	31.800.000,00
	<i>Menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Kegiatan)</i>	1	10.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			36.400.000,00
	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)</i>	1.00	
	<i>Menyusun Dokumen RKA- SKPD (Kegiatan)</i>	1	36.400.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen			7.000.000,00

Perubahan RKA-SKPD			
	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1.00	
	<i>Menyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kegiatan)</i>	1	7.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			26.800.000,00
	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>	1	
	<i>Menyusun DPA-SKPD (Kegiatan)</i>	1	26.800.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			7.000.000,00
	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>	1	
	<i>Menyusun Perubahan DPA-SKPD (Kegiatan)</i>	1	7.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.000.000,00
	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	1.00	
	<i>Melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kali)</i>	4	23.000.000,00
	<i>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di lapangan (Kali)</i>	10	30.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.573.786.029,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.568.786.029,00
	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)</i>	47.00	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)</i>	46	4.568.786.029,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.000.000,00

	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	1	
	<i>Menyusun Laporan Akhir Tahun (Laporan)</i>	1	5.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			63.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut			30.000.000,00
Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)</i>	70	
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas (PDH/Pakaian Hitam Putih/Pakaian Batik/Pakaian Olah Raga) dan Atribut ASN (Paket)</i>	60	30.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			8.000.000,00
	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>	8.00	
	<i>Mengikutsertakan Pegawai pada Pendidikan atau Pelatihan (Orang)</i>	2	8.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			10.000.000,00
	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>	30.00	
	<i>Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)</i>	15	10.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			15.000.000,00
	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>	25.00	
	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)</i>	3	15.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah			357.600.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			40.000.000,00

	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	25.00	
	<i>Menyediakan Makan, Kudapan dan Minum (Paket)</i>	8	40.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			120.000.000,00
	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	2	
	<i>Pembuatan Cetak Map Logo / Kalender / Blanko (Jenis)</i>	3	120.000.000,00
Penyediaan Bahan/Material			35.000.000,00
	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)</i>	25	
	<i>Menyediakan ATK (Paket)</i>	6	30.000.000,00
	<i>Menyediakan Materai (Buah)</i>	500	5.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			140.000.000,00
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	1	
	<i>Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (Laporan)</i>	30	100.000.000,00
	<i>Rapat Kordinasi dan Konsultasi di Luar daerah (Laporan)</i>	4	40.000.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			22.600.000,00
	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</i>	1	
	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektornik pada SKPD (Dokumen)</i>	1	10.000.000,00
	<i>Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website</i>	36	12.600.000,00

	(Orang / Bulan)		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			65.200.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-
	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)</i>		
	<i>Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan (Unit)</i>	1	
Pengadaan Mebel			30.000.000,00
	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)</i>	16.00	
	<i>Pengadaan Mebel (Meja/kursi Pajabat/staf Lemari, Meja Rapat) (Unit)</i>	3	30.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.200.000,00
	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	6.00	
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin (PC/Laptop, Printer, AC, Camera) (Jenis)</i>	4	35.200.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			98.000.000,00
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	1	
	<i>Pendukung jasa surat menyurat seperti paket/pengiriman, iuran jaminan/asuransi, dan jasa tenaga administrasi dan tenaga operator komputer (Laporan)</i>	1	98.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.000.000,00
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	1	
	<i>langganan jasa Internet dan TV kabel (Laporan)</i>	1	10.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			369.200.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			140.000.000,00
	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>		

	(Unit)		
	Belanja bahan Bakar dan pelumas (Tahun)	1	60.000.000,00
	Pemeliharaan Mesin Bermotor Perorangan (Unit)	2	80.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			149.200.000,00
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		
	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Unit)	12	50.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin beroda dua (Tahun)	1	99.200.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000.000,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Pendingin (Unit)	3	10.000.000,00
	Pemeliharaan Personel Komputer (Unit)	5	10.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			60.000.000,00
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (Tahun)	1	60.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			2,702,335,294.00
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Nilai)	80	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Nilai)	86.3	
	Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal (Persentase)	26.32	
	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan (Kkal/kapita/hari)	3600	
	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah (Persentase)	22	
	Angka Kecukupan Protein (AKP) (Persentase)	77.5	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			1.482.335.294,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			399.200.000,00
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	<p><i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)</i></p>	1.00	
	<p><i>Pasar Murah/Operasi Pasar (subsidi biaya angkut) (Kali)</i></p>	15	300.000.000,00
	<p><i>Pemantauan distribusi Pangan(keluar-masuknya pangan); di Pasangkayu dan Polman. Pemantauan di lakukan pada petugas pengambil data (masing-masing 1 orang. Pemantauan dilakukan per triwulan) (Lokasi)</i></p>	2	19.200.000,00
	<p><i>Penunjang (Paket)</i></p>	1	80.000.000,00
			730.000.000,00
	<p><i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)</i></p>	1.00	
	<p><i>Gersaharum : Melaksanakan Bimtek kepada kelompok Calon Penerima Manfaat (Kelompok)</i></p>	2	35.000.000,00
	<p><i>Gersaharum : Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Berupa Benih Sayuran (Benih Kacang panjang, Benih Jagung manis, Benih Kol, Benih Pepaya California, Benih Kangkung, Benih Pare, Benih Cabai Besar, Benih Cabai Kecil, Benih Tomat, Benih Timun, Benih Terong, Benih Bayam, Bibit Semangka) (Kelompok)</i></p>	1	10.000.000,00
	<p><i>Gersaharum : Pembibitan Bibit Cabai (Lokasi)</i></p>	1	10.000.000,00

	Gersaharum : pembuatan demplot (tandon, selang, Cangkul, Sekop, hansprayer, gembor, alkon, pipa air, paranet, bambu, pupuk kandang/cair, tanah topsoil, polybag, pestisida, waring) (Kelompok)	1	31.000.000,00
	Honor pendamping (Gersaharum) (Orang)	4	34.000.000,00
	KETAPANG - Bantuan bibit ayam (Kandang Ayam, Bimtek, Operasional pendukung, honor pendamping) (Kelompok)	1	10.000.000,00
	KETAPANG - Bantuan bibit ayam (Kandang Ayam, Bimtek, Operasional pendukung, honor pendamping) (Kelompok)	5	45.000.000,00
	KETAPANG - Bantuan bibit ayam (Kandang Ayam, Bimtek, Operasional pendukung, honor pendamping) (Kelompok)	1	20.000.000,00
	KETAPANG - Bantuan bibit Itik (Kandang itik, Bimtek, Operasional pendukung, honor pendamping) (Kelompok)	1	10.000.000,00
	KETAPANG - Bantuan bibit Itik (Kandang itik, Bimtek, Operasional pendukung, honor pendamping) (Kelompok)	1	15.000.000,00
	KETAPANG - Gerakan Sayang Halaman Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)	1	10.000.000,00
	KETAPANG - Gerakan Sayang Halaman Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)	1	10.000.000,00
	KETAPANG - Gerakan Sayang Halaman Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)	1	15.000.000,00
	KETAPANG - Gerakan Sayang Halaman Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)	1	15.000.000,00
	KETAPANG - Gerakan Sayang Halaman Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)	1	15.000.000,00
	KETAPANG - Gerakan Sayang Halaman Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)	1	15.000.000,00
	KETAPANG - Gerakan Sayang Halaman Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)	1	10.000.000,00

	<i>KETAPANG - Gerakan Sayang Halam Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)</i>	1	10.000.000,00
	<i>KETAPANG - Gerakan Sayang Halam Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)</i>	1	10.000.000,00
	<i>KETAPANG - Gerakan Sayang Halam Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)</i>	1	10.000.000,00
	<i>KETAPANG - Gerakan Sayang Halam Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)</i>	1	10.000.000,00
	<i>KETAPANG - Gerakan Sayang Halam Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)</i>	1	10.000.000,00
	<i>KETAPANG - Gerakan Sayang Halam Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)</i>	1	10.000.000,00
	<i>KETAPANG - Gerakan Sayang Halam Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)</i>	1	10.000.000,00
	<i>KETAPANG - Gerakan Sayang Halam Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)</i>	1	10.000.000,00
	<i>KETAPANG - Gerakan Sayang Halam Rumah (GERSAHARUM) (Kelompok)</i>	1	10.000.000,00
	<i>KETAPANG - Pembibitan Bibit Cabai (Kelompok)</i>	1	15.000.000,00
	<i>KETAPANG - Study Banding (Gersaharum) (Orang)</i>	8	80.000.000,00
	<i>Pembuatan kandang ayam/itik (Kelompok)</i>	1	15.000.000,00
	<i>pembuatan rumah bibit (Kelompok)</i>	1	15.000.000,00
	<i>Pengadaan bibit ayam (Ekor)</i>	200	20.000.000,00
	<i>Pengadaan bibit Itik (Ekor)</i>	150	15.000.000,00
	<i>Study Banding (Gersaharum) (Orang)</i>	8	80.000.000,00
	<i>Study Banding (Gersaharum) (Orang)</i>	1	
	<i>Study Banding (Gersaharum) (Orang)</i>	8	80.000.000,00
	<i>Study Banding (Gersaharum) peserta (Orang)</i>	8	40.000.000,00
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			280.000.000,00
	<i>Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan)</i>	1.00	

	Melakukan pemantauan harga di pasar; di 6 kabupaten. Pasar induk/central di tiap kabupaten. Waktu pelaksanaan pada saat menjelang HBKN (Bulan Puasa dan Idulfitri, idul Adha, Natal dan Tahun Baru), dan hari H HBKN dan saat ada informasi kenaikan harga diatas HAP/HET; biaya responden (kalkulator/timbangan), biaya honor pengelola data dan enumerator. (Kegiatan)	1	72.500.000,00
	Melakukan Pertemuan Koordinasi HAP/HET (Orang)	25	22.500.000,00
	Melakukan Rakor tingkat Asosiasi pedagang, komoditas Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Pelaksanaan 2 kali pertemuan TW.1 dan TW.3; Asosiasi pedagang beras di dan Kab. Polman. Asosiasi pedagang Hortikultura atau pedagang peternakan Kab. Mamuju; (30 Orang) (Kegiatan)	1	70.000.000,00
	Penunjang (Distribusi) (Paket)	1	15.000.000,00
	Penyusunan Laporan Nearaca Bahan Makanan; Pertemuan (Rapat kordinasi) dengan Kabupaten untuk menyusun NBM, di Mamuju. Dengan peserta dari 6 Kabupaten; 25 org; Melakukan evaluasi data NBM ke Kabupaten (Kegiatan)	1	55.000.000,00
	Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan Neraca Pangan Strategis dan SISMONTOK; peserta dari dinas di 6 Kabupaten dan provinsi. Yang menenangani Neraca Pangan wilayah; 30 Orang. (Kegiatan)	1	45.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			-
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Dokumen)	1.00	
	Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan di Pasar Regional (Orang)	90	

Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			73.135.294,00
	<i>Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (Unit)</i>	2.00	
	<i>Penunjang (Paket)</i>	1	28.135.294,00
	<i>Rapat untuk Pembentukan keLembagaaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) , Kordinasi dan Pematauan Jaringan Distribusi (Orang)</i>	50	45.000.000,00
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			520.000.000,00
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara (Ton)</i>	123.50	30.000.000,00
	<i>Biaya Pemeliharaan di Bulog (Kg)</i>	15.000	30.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi			490.000.000,00
	<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)</i>	1.00	
	<i>Kordinasi Pengadaan Cadangan pangan (Kali)</i>	6	36.000.000,00
	<i>Pembuatan Regulasi Perda Penyelenggaraan Cadangan Panga (Paket)</i>	1	100.000.000,00
	<i>Pengadaan Cadangan Pangan (Beras) (Kg)</i>	18.699	280.485.000,00
	<i>Penunjang (Paket)</i>	1	73.515.000,00
	<i>Rapat koordinasi Pengadaan Cadangan Pangan (Orang)</i>	40	
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat			-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal			-
	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal</i>	1.00	

	(Laporan)		
	Penentuan harga Minimum (Orang)	90	
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			700.000.000,00
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			270.000.000,00
	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	1.00	
	Bimbingan Teknis Pengolahan Pangan Lokal (Amplang, keripik pisang, abon) peserta terdiri dari Kelompok Usaha dan umum. 50 orang peserta. (Kali)	1	75.000.000,00
	Festival Pangan Sulawesi Barat; peserta dari 6 kabupaten, PKK, dan UMKM (dalam bentuk pameran dan lomba masakan dan seminar edukasi) (Kali)	1	60.000.000,00
	Penunjang (Paket)	1	25.000.000,00
	Penunjang (Paket)	1	30.000.000,00
	Penunjang (Paket)	1	25.000.000,00
	Promosi pangan Lokal (Kali)	2	55.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			280.000.000,00
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	1.00	
	Bimtek Penyusunan Menu Makanan Keluarga B2SA (Kali)	2	100.000.000,00
	Desa Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA); melakukan pengolahan dan makan bersama di poosyandu untuk anak/balita stunting atau kurang gizi. (Kegiatan)	1	90.000.000,00
	Kampanye Gemar makan telur (telur dan prodak olahannya, baliho, souvenir, doorprize) (Kali)	1	45.000.000,00

	<i>Penunjang (Paket)</i>	1	20.000.000,00
	<i>Penunjang (Paket)</i>	1	15.000.000,00
	<i>Penunjang (Paket)</i>	1	10.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			150.000.000,00
	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)</i>	1	
	<i>Analisis Pola Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan (dalam bentuk Bimbingan teknis) (Kegiatan) Penunjang (Paket)</i>	1	130.000.000,00
		1	20.000.000,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (Persentase)</i>	50	620.000.000,00
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi			230.000.000,00
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			230.000.000,00
	<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)</i>	7	
	<i>Rapat, Kordinasi dan Bimtek Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) bulanan dan Tahunan (Dokumen)</i>	7	130.000.000,00
	<i>Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Prov dan Kabupaten (Dokumen)</i>	7	100.000.000,00
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			390.000.000,00
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			265.000.000,00
	<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)</i>	1.00	

	<i>Pengadaan dan penyaluran bantuan pemerintah dlm Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan (Telur, Ayam Beku, Susu dan Bahan Pangan Lainnya) (daerah)</i>	6	265.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi			125.000.000,00
	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (Dokumen)</i>	1	
	<i>Rapat Kordinasi Sektoral dan Kabupaten (dinkes, PU, Dinsos, Perkim, BPS, Bappeda, pemberdayaan perempuan, diknas, BKKBN, PMD, BPBD, TPHP, Bulog (Laporan)</i>	6	125.000.000,00
	<i>Regulasi (PERGUB) Penanganan Daerah Rawan Pangan (Kali)</i>	1	
	<i>Regulasi (PERGUB) Penanganan Daerah Rawan Pangan (Kali)</i>	1	
	<i>study banding (Kali)</i>	1	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			330,000,000.00
	<i>Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan (Persentase)</i>	93	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			330.000.000,00
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi			30.000.000,00
	<i>Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina (Dokumen)</i>	1.00	
	<i>Apresiasi Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Kali)</i>	2	
	<i>Audit Internal Dokumen Sistem Mutu (Kali)</i>	1	
	<i>Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh (PPC), Inspektur/Pengawas dan auditor Kemanan Pangan (Orang)</i>	80	
	<i>Rapat Kordinasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Petugas Teknis Kab dan Provins (Kali)</i>	1	30.000.000,00
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			170.000.000,00

	<i>Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Sertifikat)</i>	15.00	
	<i>Pengambilan dan Pengujian Sampel PSAT;(Sarung Tangan, Gunting pangkas, Plastik Sheet, Keranjang Buah, box buah, isolasi, gunting,label,lem, Spidol permant,amluminium foil), biaya uji laboratorium (Kali)</i>	5	78.000.000,00
	<i>Promosi Kemanaan Pangan segar asal Tumbuhan yang sudah disertifikasi dan registrasi (Kali)</i>	20	
	<i>Sosialisasi dan Promosi Pangan Segar Asal tumbuhan yang sudah disertifikasi dan registrasi (Kali)</i>	1	26.000.000,00
	<i>Surveilan Pelaku Usaha (Kali)</i>	2	35.000.000,00
	<i>Survey Pelaku Usaha (Kali)</i>	12	31.000.000,00
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			-
	<i>Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1	
	<i>Pengambilan dan Pengujian Sampel PSAT (Kali)</i>	6	
	<i>Promosi Keamanan Pangan Segar (Kali)</i>	10	
	<i>Sosialisasi Kemanaan Pangan (Kali)</i>	3	
	<i>Surveilan Pelaku Usaha (Kali)</i>	10	
	<i>Survey Pelaku Usaha (Kali)</i>	12	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00
	<i>Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1.00	

	<i>Rapat Komisi Teknis (jumlah peserta 20 org. Dilaksanakan 2 kali) (Kali)</i>	2	30.000.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan			100.000.000,00
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Dokumen)</i>	1.00	
	<i>Pengadaan Alat Uji Keamanan Pangan (Post Market); bahan kimia (formalin dan Pestisida) (Paket)</i>	5	37.150.400,00
	<i>Pengadaan atau belanja Bahan Sampel PSAT (Paket)</i>	6	5.459.600,00
	<i>Pengawasan/ pengambilan sampel PSAT (Kali)</i>	29	57.390.000,00
J U M L A H			9.421.121.323,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026 dalam menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024.

Rencan Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi Provinsi Sulawesi Barat diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Mamuju, 2023

KEPALA DINAS,

Ir. H. ABD. WARIS BESTARI, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19651201 199703 1 005